

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Geografi

a. Pengertian Geografi

Para pakar geografi dalam Seminar dan Lokakarya Peningkatan Kualitas Pengajaran Geografi di Semarang tahun 1998, telah merumuskan konsep geografi sebagai berikut: geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahannya dalam konteks keruangan. Konsep geografi yang diketengahkan di atas secara jelas menegaskan bahwa yang menjadi obyek studi geografi tidak lain adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang hakikatnya merupakan bagian dari bumi yang terdiri dari atmosfer (lapisan udara), litosfer (lapisan batuan, kulit bumi), hidrosfer (lapisan air, perairan), dan biosfer (lapisan kehidupan). Pada konsep ini, geosfer atau permukaan bumi ditinjau dari sudut pandang kewilayahannya atau kelingkungannya yang menampakkan persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan tersebut tidak terlepas dari adanya relasi keruangan dari unsur-unsur geografi yang membentuknya (Nurdin Sumaatmaja, 2001 : 11)

b. Pendekatan Geografi

Dalam geografi untuk mendekati suatu permasalahan, digunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan keruangan (*spatial approach*), pendekatan ekologi (*ecological approach*), dan pendekatan kompleks wilayah (*regional complex approach*) (Bintarto dan Surastopo, 1981:12-30).

1) Pendekatan Keruangan

Analisa keruangan mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting atau seri sifat-sifat penting. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam analisa keruangan yang harus diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancangkan. Analisa keruangan dapat diketahui dari pengumpulan data lokasi yang terdiri dari data titik (point data) seperti: data ketinggian tempat, data sampel tanah, data sampel batuan, dan data bidang (areal data) seperti: data luas hutan, data luas daerah pertanian, data luas padang alang-alang.

2) Pendekatan Ekologi

Studi mengenai interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan disebut ekologi, sehingga dalam mempelajari ekologi seseorang harus mempelajari organisme hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan serta lingkungannya seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer. Organisme hidup dapat pula mengadakan interaksi

dengan organisme yang lain. Manusia merupakan satu komponen dalam organisme hidup yang penting dalam proses interaksi. Oleh karena itu muncul pengertian ekologi manusia (*human ecology*) dimana dipelajari interaksi antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya.

3) Pendekatan Kompleks Wilayah

Kombinasi antara analisa keruangan dan analisa ekologi disebut analisa kompleks wilayah. Dalam analisa ini, wilayah-wilayah tertentu didekati dengan pengertian *areal differentiation*, yaitu suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Pada analisa ini diperhatikan pula mengenai penyebaran fenomena tertentu (analisa keruangan) dan interaksi antara variabel manusia dan lingkungannya untuk kemudian dipelajari kaitannya sebagai analisis kelengkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kompleks wilayah, karena peneliti menganalisis persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta, dan kemudian menganalisis kesesuaian jumlah penduduk usia sekolah dengan fasilitas pendidikan.

c. Prinsip Geografi

Terdapat empat prinsip geografi sebagaimana yang diungkapkan Nursid Sumaatmadja dalam buku Studi Geografi, Suatu Pendekatan dan Analisa keruangan (1988, 42-44), antara lain:

1) Prinsip Penyebaran/ *Spreading Principle*

Prinsip penyebaran dapat digunakan untuk menggambarkan gejala dan fakta geografi dalam peta serta mengungkapkan hubungan antara gejala geografi yang satu dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan penyebaran gejala dan fakta geografi tidak merata antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Dalam penelitian ini prinsip penyebaran digunakan untuk mengetahui persebaran fasilitas pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta.

2) Prinsip interrelasi/ *Interrelationship Principle*

Prinsip interrelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara gejala fisik dan non fisik. Prinsip tersebut dapat mengungkapkan gejala atau fakta Geografi di suatu wilayah tertentu.

3) Prinsip deskripsi/ *Descriptive Principle*

Prinsip deskripsi dalam geografi digunakan untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah geografi yang dianalisis. Prinsip ini tidak hanya menampilkan deskripsi dalam bentuk peta, tetapi juga dalam bentuk diagram, grafik maupun

tabel. Prinsip deskripsi digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk merepresentasikan data dalam bentuk tabel klasifikasi, dan juga peta.

4) Prinsip korologi/ *Chorological Principle*

Prinsip korologi disebut juga prinsip keruangan. Dengan prinsip ini dapat dianalisis gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau dari penyebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam ruang.

d. Konsep Geografi

Geografi memiliki sepuluh konsep–konsep esensial (Suharyono dan Moch Amien, 1994 : 26 - 34), antara lain:

1) Konsep Lokasi

Lokasi sangat berkaitan dengan keadaan sekitarnya yang dapat memberi arti sangat menguntungkan ataupun merugikan. Lokasi digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer karena lokasi suatu objek akan membedakan kondisi di sekelilingnya. Konsep lokasi digunakan dalam penelitian ini untuk membahas mengenai letak lokasi fasilitas pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta. Fasilitas tersebut mencakup lokasi SD, SMP, dan SMA.

2) Konsep Jarak

Jarak mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Jarak berkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan atau keperluan pokok kehidupan,

pengangkutan barang dan penumpang. Jarak dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh baik yang dikaitkan dengan waktu perjalanan yang diperlukan ataupun satuan biaya angkutan.

3) Konsep Aksesibilitas

Aksesibilitas juga berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Tempat-tempat yang memiliki keterjangkauan tinggi akan mudah mencapai kemajuan dan mengembangkan perekonomiannya.

4) Konsep Pola

Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik fenomena alami (misalnya jenis tanah, curah hujan, persebaran, vegetasi) ataupun fenomena sosial budaya (misalnya permukiman, persebaran penduduk, pendapatan, mata pencaharian). Konsep pola digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis persebaran fasilitas pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta.

5) Konsep Morfologi

Morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Bentuk daratan merupakan perwujudan wilayah yang mudah digunakan untuk usaha-usaha perekonomian.

6) Konsep Aglomerasi

Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit yang paling menguntungkan baik karena kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor yang menguntungkan.

7) Konsep Nilai Kegunaan

Nilai kegunaan fenomena atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif artinya tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu.

8) Konsep Interaksi Interdependensi

Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya-daya, objek atau tempat satu dengan tempat lainnya.

9) Konsep Diferensiasi Area

Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak individualis tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari tempat atau wilayah yang lain. Unsur atau fenomena lingkungan bersifat dinamis dan interaksi atau integrasinya juga menghasilkan karakteristik yang berubah dari waktu ke waktu.

10) Konsep Keterkaitan Keruangan

Keterkaitan keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di suatu tempat atau ruang baik yang menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial.

2. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menumbuhkan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU Sisdiknas Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Unsur-unsur yang secara esensial tercakup dalam pengertian pendidikan menurut Dwi Siswono (2008, 19-20) dalam bukunya “Ilmu Pendidikan”, adalah sebagai berikut :

1. Dalam pendidikan terkandung pembinaan (pembinaan kepribadian), pengembangan (pengembangan kemampuan-kemampuan atau potensi-potensi yang perlu dikembangkan), peningkatan (misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak tahu tentang dirinya menjadi tahu tentang dirinya), serta tujuan (kearah mana peserta didik akan diharapkan mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin).
2. Dalam pendidikan, secara implisit terjalin hubungan antara dua pihak, yaitu pendidik dan peserta didik yang di dalam hubungan itu berlainan kedudukan serta peranan setiap pihak, akan tetapi sama dalam hal dayanya yaitu saling

- mempengaruhi, guna terlaksananya proses pendidikan (transformasi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan) yang tertuju pada tujuan-tujuan yang diinginkan.
3. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi diri dalam rangka pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan.
 4. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, dalam sekolah, dan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan pendidik maupun peserta didik, dalam proses tersebut terjadi transfer pengetahuan yang kemudian menjadikan peserta didik lebih berkembang baik sebagai individu, makhluk sosial maupun makhluk Tuhan. Pendidikan itu sendiri tidak hanya bersifat formal (dalam sekolah), tetapi juga ada pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

b. Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi : (1) menyiapkan manusia sebagai manusia, (2) menyiapkan tenaga kerja, karena dalam hidupnya manusia harus melakukan suatu karya, dan (3) menyiapkan warga

negara yang baik, yang dapat melaksanakan semua kewajiban dan menyadari akan haknya secara baik (Dwi Siswono, dkk, 2008 : 79).

Menurut Jeane H. Balantine 1983 : 5-7 dalam Siswono, dkk, 2006 : 80, fungsi pendidikan dalam masyarakat meliputi fungsi sosialisasi, fungsi seleksi, latihan dan alokasi, fungsi inovasi dan perubahan sosial, serta fungsi pengembangan pribadi dan sosial.

Tujuan pendidikan terdapat dalam UU No.2 Tahun 1985 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa.

Menurut TAP MPR No 4/MPR/1975, tujuan pendidikan adalah membangun di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang berPancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokratis dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.

c. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas sosial merupakan kegiatan atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut diantaranya: fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas kemasyarakatan, fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, dan tempat perkuburan.

Terdapat 4 (empat) jenis fasilitas pendidikan menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.378/KPTS/1987, yaitu:

1. Taman Kanak-Kanak, merupakan fasilitas pendidikan yang paling dasar yang diperuntukkan bagi anak-anak usia (5-6) tahun.
2. Sekolah Dasar, merupakan fasilitas pendidikan yang disediakan untuk anak-anak usia antara (6-12) tahun.
3. Sekolah Menengah Pertama, merupakan fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak-anak lulusan Sekolah Dasar.
4. Sekolah Menengah Atas : merupakan fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak-anak lulusan SMP.

UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 14 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 17 menyebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang

sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya pada pasal 18 dijelaskan yang dimaksud dengan pendidikan menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Selain itu dijelaskan juga bahwa pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Permendiknas No.24 tahun 2007 merupakan peraturan yang membahas tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Secara garis besar, Permendiknas No.24 tahun 2007 terdiri dari empat indikator standar sarana dan prasarana baik

untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Indikator tersebut antara lain adalah satuan pendidikan, bangunan, lahan, dan standar prasarana.

Indikator yang pertama adalah satuan pendidikan, pada sub bab mengenai satuan pendidikan diuraikan mengenai ketentuan pelayanan minimum, dan juga penambahan sarana. Selain itu, terdapat pula perbedaan antara ketentuan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas. Adapun ketentuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Ketentuan Satuan Pendidikan Permendiknas No.24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

No.	Jenjang Pendidikan	Ketentuan
1.	SD	<ul style="list-style-type: none"> 1. Satu SD/MI memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. 2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan. 3. Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan SD/MI baru. 4. Pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.
2.	SMP	<ul style="list-style-type: none"> 1. Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. 2. Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan. 3. Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. 4. Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.
3.	SMA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Satu SMA/MA memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. 2. Minimum satu SMA/MA disediakan untuk satu kecamatan.

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

Indikator yang kedua adalah lahan. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana sekolah/madrasah meliputi bangunan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan. Indikator yang ketiga adalah bangunan. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Pada Permendiknas No.24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) diuraikan mengenai standar rasio minimum lahan, dan rasio minimum bangunan untuk tiap jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA), seperti yang dijelaskan dalam tabel-tabel berikut :

a. Lahan SD/MI

- 1) SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 2.Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik SD/MI

No.	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik ($m^2/peserta didik$)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7 -12	11,1	6,0	4,2
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

- 2) SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, ketentuan luas minimum lahan tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Minimum Lahan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No.	Banyak Rombongan Belajar	Luas minimum lahan (m^2)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	1340	770	710
2	7 -12	2240	1220	850
3	13-18	3170	1690	1160
4	19-24	4070	2190	1460

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

b. Bangunan SD/MI

- 1) SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik SD/MI

No.	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik ($m^2/peserta didik$)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7 -12	3,3	3,6	3,6
3	13-18	3,2	3,4	3,4
4	19-24	3,1	3,3	3,3

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

- 2) SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, ketentuan luas minimum lantai tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No.	Banyak Rombongan Belajar	Luas minimum lantai bangunan (m^2)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	400	460	490
2	7 -12	670	730	760
3	13-18	950	1010	1040
4	19-24	1220	1310	1310

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

c. Lahan SMP/MTs

- 1) SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik SMP/MTS

No.	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	22,9	14,3	-
2	4-6	16,8	8,5	7,0
3	7-9	13,8	7,5	5,0
4	10-12	12,8	6,8	4,5
5	13-15	12,2	6,6	4,4
6	16-18	11,9	6,3	4,3
7	19-21	11,6	6,2	4,2
8	22-24	11,4	6,1	4,2
9	25-27	11,2	6,0	4,2

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

- 2) SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, ketentuan luas minimum lahan tercantum pada

Tabel 7.

Tabel 7. Luas Minimum Lahan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No.	Banyak Rombongan Belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	1420	1240	-
2	4-6	1800	1310	1220
3	7-9	2270	1370	1260
4	10-12	2740	1470	1310
5	13-15	3240	1740	1360
6	16-18	3800	2050	1410
7	19-21	4240	2270	1520
8	22-24	4770	2550	1700
9	25-27	5240	2790	1860

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

d. Bangunan SMP/MTs

- 1) SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik SMP/MTS

No.	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik ($m^2/peserta didik$)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	6,9	7,6	-
2	4-6	4,8	5,1	5,3
3	7-9	4,1	4,5	4,5
4	10-12	3,8	4,1	4,1
5	13-15	3,7	3,9	4,0
6	16-18	3,6	3,8	3,8
7	19-21	3,5	3,7	3,7
8	22-24	3,4	3,6	3,7
9	25-27	3,4	3,6	3,6

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

- 2) SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan

belajar, ketentuan luas minimum lantai tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No.	Banyak Rombongan Belajar	Luas minimum lantai bangunan (m^2)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	420	480	-
2	4-6	540	610	640
3	7-9	680	740	770
4	10-12	820	880	910
5	13-15	970	1040	1070
6	16-18	1140	1230	1230
7	19-21	1270	1360	1360
8	22-24	1430	1530	1530
9	25-27	1570	1670	1670

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

e. Lahan SMA/MA

- 1) SMA/MA yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik SMA/MA

No.	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	36,5	19,3	-
2	4-6	22,8	12,2	8,1
3	7-9	18,4	9,7	6,5
4	10-12	16,3	8,7	5,9
5	13-15	14,9	7,9	5,3
6	16-18	14,0	7,5	4,9
7	19-21	13,5	7,2	4,8
8	22-24	13,2	7,0	4,7
9	25-27	12,8	6,8	4,6

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

- 2) SMA/MA yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Luas Minimum Lahan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No.	Banyak Rombongan Belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	2140	1360	-
2	4-6	2570	1420	1290
3	7-9	3040	1640	1340
4	10-12	3570	1890	1390
5	13-15	4000	2150	1440
6	16-18	4440	2390	1590
7	19-21	5000	2670	1780
8	22-24	5570	3000	2020
9	25-27	6040	3240	2170

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

f. Bangunan SMA/MA

- 1) SMA/MA yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik SMA/MA

No.	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik ($m^2/peserta didik$)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	10,9	11,6	-
2	4-6	6,8	7,3	7,3
3	7-9	5,5	5,8	5,8
4	10-12	4,9	5,2	5,3
5	13-15	4,5	4,7	4,8
6	16-18	4,2	4,5	4,5
7	19-21	4,1	4,3	4,3
8	22-24	3,9	4,2	4,2
9	25-27	3,8	4,1	4,1

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

- 2) SMA/MA yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, ketentuan luas minimum tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No.	Banyak Rombongan Belajar	Luas minimum lantai bangunan (m^2)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	640	710	-
2	4-6	770	830	860
3	7-9	910	980	1010
4	10-12	1070	1130	1160
5	13-15	1200	1290	1290
6	16-18	1330	1430	1430
7	19-21	1500	1600	1600
8	22-24	1670	1800	1810
9	25-27	1810	1940	1950

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

Indikator yang keempat adalah standar prasarana yang seharusnya dimiliki oleh setiap sekolah. Pengertian prasarana itu sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Berikut ini

merupakan tabel standar prasarana menurut Permendiknas No.24 tahun 2007 :

Tabel 14. Standar Prasarana menurut Permendiknas No.24 tahun 2007

No.	Jenjang Pendidikan	Standar Prasarana
1.	SD	Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 1. ruang kelas, 7. ruang UKS, 2. ruang perpustakaan, 8. jamban, 3. laboratorium IPA, 9. gudang, 4. ruang pimpinan, 10. ruang sirkulasi, 5. ruang guru, 11. tempat bermain/berolahraga. 6. tempat beribadah,
2.	SMP	Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 1. ruang kelas, 8. ruang konseling, 2. ruang perpustakaan, 9. ruang UKS, 3. ruang laboratorium IPA, 10. ruang organisasi kesiswaan, 4. ruang pimpinan, 11. jamban, 5. ruang guru, 12. gudang, 6. ruang tata usaha, 13. ruang sirkulasi, 7. tempat beribadah, 14. tempat bermain/berolahraga.
3.	SMA	Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 1. ruang kelas, 10. ruang tata usaha, 2. ruang perpustakaan, 11. tempat beribadah, 3. ruang lab. biologi, 12. ruang konseling, 4. ruang lab. fisika, 13. ruang UKS, 5. ruang lab. kimia, 14. ruang organisasi kesiswaan, 6. ruang lab. komputer, 15. jamban, 7. ruang lab. bahasa, 16. Gudang, 8. ruang pimpinan, 17. ruang sirkulasi, 9. ruang guru, 18. tempat bermain/berolahraga.

Sumber : Permendiknas No.24 tahun 2007

4. Penduduk

a. Pengertian Penduduk

Penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Sah dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan tata cara masuk dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara yang bersangkutan (Sunarso. dkk, 2006 : 18). Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di wilayah

tersebut. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

b. Penduduk usia sekolah

Penduduk usia sekolah adalah mereka yang pada usia sekolah normal sesuai dengan tingkat pendidikan. Misalnya: penduduk usia sekolah dasar (SD) adalah penduduk usia 7-12 tahun, SMP adalah 13-15 tahun dan penduduk usia SMA adalah 16-18 tahun (http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk_usia_sekolah).

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah terdiri dari angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa seluruhnya (di jenjang pendidikan tertentu) dengan jumlah penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah (di jenjang pendidikan tertentu) dengan jumlah penduduk usia sekolah (Husaini, 2006 dalam Widianantari 2008 : 31).

Angka partisipasi sekolah adalah persentase penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu terhadap seluruh penduduk pada umur tersebut. Angka ini merupakan salah satu indikator yang menggambarkan berapa banyak penduduk yang mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan. Meningkatnya angka partisipasi

sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Atau lebih jelasnya bahwa peningkatan angka partisipasi sekolah mengandung arti semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah.

B. Penelitian Relevan

Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan :

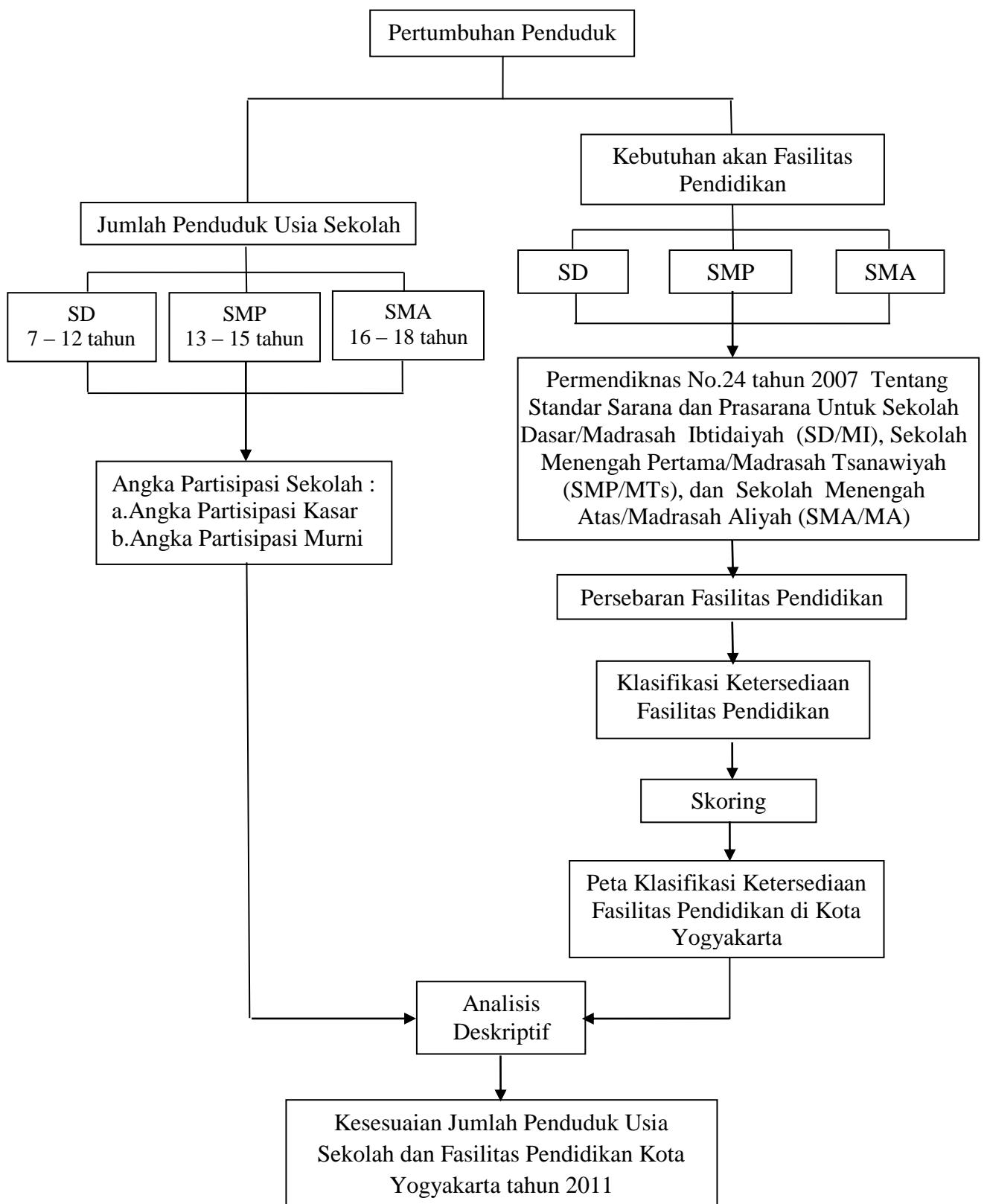
Tabel 15. Peneltian Relevan

No.	Nama,Judul,Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	Widianantari, Kebutuhan dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, 2008	Mengkaji jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan menengah di pedesaan	Analisis Jangkauan pelayanan pendidikan, analisis Angka Partisipasi Kasar (APK), analisis Angka Partisipasi Murni (APM), analisis Tingkat Pelayanan Sekolah, dan analisis rasio siswa per kelas	Meskipun jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang sudah bisa menjangkau di wilayah tersebut bahkan keluar wilayah kecamatan, namun masih ada 2 SLTP wilayah kecamatan Bandongan yang belum bisa terlayani
2.	Trio Adi Prasetyo, Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumirejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis, 2007	mengembangkan sebuah informasi untuk memetakan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Bumirejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan berbasis Sistem Informasi Geografis	Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif.	75% sarana dan prasarana Kelurahan Bumirejo dengan kondisi baik, 16,17% sarana dan prasarana Kelurahan Bumirejo dalam kondisi sedang, dan 8,8% sarana dan prasarana Kelurahan Bumirejo dengan kondisi buruk
3	Anna Yuniarti Preferensi Penghuni Kawasan Perumahan Kota Wisata Cibubur dan Limus Pratama Regency Terhadap Fasilitas Pendidikan, 2010	mengetahui preferensi penghuni terhadap fasilitas pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah tabulasi silang, yaitu analisis statistik untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel dengan preferensi penghuni dalam memilih fasilitas pendidikan	pola preferensi penghuni terhadap fasilitas pendidikan di Perumahan Kota Wisata dan Perumahan Limus Pratama Regency berbanding lurus dengan orientasi hidupnya, yaitu dari 'kebutuhan (need)' ke arah 'keinginan (want)'. Semakin tinggi tingkat penghasilan dan tingkat pendidikannya, semakin mengarah pula orientasi kehidupannya ke arah 'keinginan (want)'.

C. Kerangka Berpikir

Hak mendapat pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi bagi setiap Warga Negara Indonesia telah dijamin oleh Peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan tersebut, maka pemerintah diantaranya harus mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang bisa melayani kebutuhan seluruh penduduk dan tentunya bisa diakses dengan mudah oleh penduduk untuk memanfaatkannya dengan pengorbanan sumber daya yang sama.

Untuk mengetahui klasifikasi fasilitas pendidikan di Kota Yogyakarta peneliti menggunakan acuan Permendiknas No.24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan telah mengalami pengolahan, maka dapat ditentukan klasifikasi fasilitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Adapun diagram kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar1. Kerangka Berpikir Penelitian